

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi, Harsono. 2000. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Mulyadi. 2008. *System Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yahya, Harahap. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.

Pengaturan Perundang-undangan

- Kemenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 Pasal 1 ayat (1) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Undang Undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah.
- Undang-Undang No 54 Tahun 2010 (Pasal 83) Tentang Pembatalan Lelang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 (Pasal 1 angka 2 dan 3) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. 01/2006 pasal 30 tentang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106./PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106/PMK. 06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010.
- Peraturan Direktorat Jendral Kekayaan Negara 06/KN2013 Tahun 2013.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Direktorat Jendral Kekayaan Negara Nomor PER 03/KN/2010 Pasal 44 menyebutkan dokumen-dokumen risalah lelang yang yang dikenakan dan tidak dikenakan bea materai.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 Pasal 37 ayat (2) tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.